

KEMELUT KAMBOJA DAN STABILITAS ASIA TENGGARA

Rosyhan TARUNA

Masalah Kamboja dewasa ini masih tetap merupakan sumber ketegangan bagi Asia Tenggara. Keinginan Vietnam untuk membentuk suatu hubungan khusus di antara ketiga negara Indocina dengan invasinya ke Kamboja akhir Desember 1978 yang lalu telah membawa ketegangan-ketegangan yang luas. Pertentangan tidak saja terjadi antara kelompok Pemerintah Koalisi Kamboja dan Vietnam, tetapi juga antara Vietnam dan RRC, dan lebih luas lagi antara Uni Soviet dan RRC yang berpacu mencari wilayah pengaruh di Asia Tenggara, khususnya di Semenanjung Indocina. Ketegangan ini tampaknya tidak akan berakhir selama Vietnam tidak menarik pasukannya dari wilayah Kamboja atau perlawanan tersebut tidak lumpuh sama sekali. Pandangan Vietnam bahwa situasi di Indocina khususnya di Kamboja adalah irreversible tambah memperkecil harapan bahwa masalah Kamboja akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Hubungan khusus yang diciptakan Vietnam dalam bentuk solidaritas militan itu mempunyai arti penting bagi Vietnam. Di dalam laporan politik pada Kongres Nasional V Partai Komunis Vietnam yang berlangsung di Hanoi bulan Maret 1982 yang lalu dikatakan bahwa "hubungan khusus Vietnam-Laos-Kamboja adalah hukum perkembangan revolusi di tiga negara tersebut yang amat penting artinya. Vietnam memandang hal ini sebagai jaminan kuat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kebebasan dan keberhasilan membangun sosialisme di tiap negara di Semenanjung Indocina serta bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

Aliansi juga merupakan soal mati hidup ketiga negara Indocina. Alasan Vietnam, kalau RRC bisa menguasai Kamboja, maka bukanlah suatu hal yang mustahil bila RRC kelak menguasai Laos dan pada akhirnya Vietnam juga.

Pemimpin-pemimpin Vietnam agaknya sudah mempunyai pemikiran jauh ke depan. Arti Laos dan Kamboja, dua negara tetangga yang mengapitnya tetapi juga sekaligus memisahkan sebagian wilayahnya dari RRC dan Thailand, dapat merupakan suatu titik kelemahan yang bisa menimbulkan suatu ancaman baginya. Kemungkinan akan timbulnya kekuatan-kekuatan anti pemerintahan setempat dapat pula mengancam keamanan Vietnam. Lebih-lebih dalam menghadapi pertikaian dengan RRC, bersatunya ketiga negara Indocina merupakan suatu kekuatan yang tangguh. Di dalam kaitan hubungan khusus atau solidaritas militan di antara ketiga negara, merupakan suatu proteksi, artinya bila ada usaha-usaha untuk menjatuhkan salah satu pemerintahan yang ada dapat pula diartikan sebagai serangan terhadap Vietnam. Posisi Laos mempunyai arti strategis bagi Vietnam karena memisahkan Kamboja dari RRC.

Selain itu pengalaman sejarah masa lalu dan potensi-potensi yang dimiliki bangsa Vietnam merupakan unsur yang dominan di dalam cita-cita Vietnam untuk membentuk suatu solidaritas militan di antara ketiga negara Indocina. Penjajahan Cina serta kepemimpinan Vietnam selama perang kemerdekaan melawan penjajahan Perancis dan Amerika Serikat banyak membantu perjuangan rakyat Laos dan Kamboja telah melahirkan ide pembentukan suatu negara federasi atau konfederasi yang kini lahir dalam bentuk solidaritas militan tersebut.

Potensi-potensi yang dimiliki Vietnam baik dalam jumlah penduduknya yang besar, karakter dan militansi angkatan perangnya, sumber-sumber daya ekonomi, luas wilayah, kedudukan strategis dan banyaknya kader-kader Laos dan Kamboja dan pro-Vietnam merupakan kelebihan-kelebihan lain Vietnam.

Dibekali dengan kesadaran bahwa pada umumnya bangsa Vietnam mempunyai kelebihan daripada kedua bangsa tetangganya, maka sejak zaman perjuangan kemerdekaan para pemimpin Vietnam sudah merasa terpanggil untuk memimpin rakyat Laos dan Kamboja.

Berdirinya Partai Komunis Indocina tahun 1931 dimaksudkan sebagai wadah bagi perjuangan ketiga negara untuk melawan penjajahan. Pemimpin-pemimpin Indocina memandang Ho Chi Minh sebagai sesepuh mereka dan Hanoi sebagai pusat perjuangannya.

Pemikiran-pemikiran itulah kiranya yang mendorong Vietnam campur tangan di Kamboja dengan invasi pasukannya pada akhir Desember 1978 yang lalu. Vietnam tidak menginginkan suatu Kamboja yang tidak bersahabat dengannya. Lebih-lebih kalau suatu Kamboja yang mencari perlindungan dari

negara lain, khususnya RRC karena hubungan kedua negara ini memang tidak pernah serasi.

Pengalaman pahit Vietnam selama penjajahan kekaisaran Cina 1.000 tahun lebih, besarnya potensi dan kecurigaan terhadap 1,3 juta golongan Cina perantauan yang berada di Vietnam, telah menimbulkan rasa kebencian dan kekhawatiran yang besar. Huang Tung, seorang anggota Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CC-PKV), menjelaskan bahwa sejak Konferensi Jenewa 1954 sudah ada gejala-gejala bahwa RRC tidak murni lagi dalam melaksanakan perjuangan proletar. Pada tahun 1960, ketika berlangsung Kongres Partai Komunis Sedunia di Moskow, hal tersebut semakin jelas. RRC menolak tesis Khrushchev yang menginginkan "hidup berdampingan secara damai dan persaingan damai dengan negara-negara kapitalis."

Lebih lanjut, dengan terjadinya pendekatan Amerika Serikat-RRC di dalam rangka pertikaian mereka dengan Uni Soviet, Vietnam yang semula mendapat bantuan RRC merasa dikhianati justru pada waktu Perang Vietnam memasuki titik yang menentukan. Bulan Juli 1971 RRC mengundang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger untuk berkunjung ke RRC. Kunjungan ini disusul muhibah Presiden Nixon yang melahirkan Komunike Shanghai.

Vietnam menyadari bahwa RRC merupakan ancaman langsung bagi keamanannya. Pendudukan Kepulauan Paracel pada bulan Januari 1974, sengketa perbatasan kedua negara dan dukungan RRC untuk rezim Pol Pot/Khmer Merah di Kamboja merupakan rangkaian usaha RRC yang mengancam keamanan Vietnam. Semua itu telah membangkitkan kekhawatiran Vietnam akan hegemoni dan ekspansi RRC.

Ketegangan hubungan RRC-Vietnam ini memuncak pada bulan Maret 1978 dengan peristiwa pengusiran puluhan ribu penduduk Vietnam keturunan Cina, sehubungan dengan tindakan pemerintah mengadakan transformasi ekonomi liberal menjadi ekonomi sosialis, khususnya di Vietnam bagian selatan. Sebagai akibat memuncaknya ketegangan ini RRC menghentikan bantuan ekonominya kepada Vietnam. Suhu ketegangan kedua negara semakin meningkat dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Vietnam-Uni Soviet dan invasi Vietnam ke Kamboja yang oleh RRC dianggap sebagai usaha-usaha Vietnam dan Uni Soviet untuk mengadakan pengepungan serta menghancurkan tempat berpijaknya.

MASUKNYA PENGARUH NEGARA-NEGARA BESAR

RRC

Uni Soviet dan RRC berpacu untuk mengganti peranan Amerika Serikat yang ditinggalkannya di Asia Tenggara. Terutama RRC yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kawasan berusaha untuk mencegah perkembangan yang mungkin dapat membahayakan keamanan nasionalnya.

Khususnya mengenai Semenanjung Indocina, RRC dan Uni Soviet berusaha untuk memperoleh posisi strategis yang menguntungkan. Bagi RRC sebagai negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos dan Birma serta berbatasan di laut dengan negara-negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara mempunyai arti strategis yang menyangkut langsung kepentingan nasionalnya.

Selain itu orang-orang keturunan Cina yang tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara dengan jumlahnya yang tidak kurang dari 15 juta orang merupakan unsur penting bagi perhatian RRC. Karenanya RRC berusaha untuk mencegah perkembangan yang dapat membahayakan keamanan nasionalnya.

Secara tradisional kawasan Asia Tenggara juga merupakan "sasaran perluasan pengaruh ekspansionisme Cina." Sebuah buku penuntun yang berjudul *Sketch of Modern Chinese History* terbitan Beijing tahun 1954 memuat sebuah peta yang menunjukkan bahwa wilayah Cina meliputi beberapa negeri di Asia Tenggara dan wilayah Laut Cina Selatan. Sehubungan dengan ini dalam suatu sidang Polit Biro CC-PKI bulan Agustus 1965, Mao Ze Dong menegaskan: "Kita harus dengan segala cara merebut Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Setelah merebut Asia Tenggara kita dapat memperbesar kekuatan kita di kawasan ini. Kita akan menjadi kuat untuk menghadapi blok Uni Soviet dan Eropa Timur." Di dalam kerangka ini tujuan jangka pendek RRC agaknya adalah untuk menguasai atau mengendalikan negara-negara di Semenanjung Indocina. RRC tidak menghendaki adanya suatu Vietnam yang kuat yang tidak bersahabat dan dapat merupakan suatu rintangan bagi strategi politik perluasan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Namun karena pertikaian dengan Uni Soviet, RRC agaknya terpaksa menempuh kebijaksanaan lain untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara. RRC memandang perlunya kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang dan ASEAN yang dianggapnya akan mampu menjaga dan memelihara stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.

Khususnya dalam hubungannya dengan ASEAN, RRC berusaha menarik simpati organisasi regional ini dan berusaha untuk selalu mensejajarkan langkahnya dengan langkah-langkah ASEAN. Tetapi di balik itu sebenarnya langkah RRC tidak terlepas dari kaitan pertikaianya dengan Vietnam dan dalam rangka yang lebih besar lagi pertikaianya dengan Uni Soviet. RRC dalam hal ini juga berusaha memanfaatkan posisi Thailand, negara yang langsung berbatasan dengan dan mendapat ancaman dari negara-negara Indocina (Vietnam dan Kamboja). Untuk dapat menanamkan pengaruhnya di Thailand, RRC berusaha meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara ini dan menjanjikan hanya akan memberikan dukungan moral dan politik saja kepada Partai Komunis Thailand. Mungkin ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai partai-partai komunis di negara-negara ASEAN khususnya Thailand lari mencari bantuan dari Vietnam atau Uni Soviet yang dapat membawa image menurunnya kepemimpinan PKC di Asia.

Uni Soviet

Uni Soviet merupakan negara raksasa dengan wilayah yang membentang dari benua Eropa hingga Asia. Jumlah penduduknya besar, kemampuan ekonomi dan militernya tinggi. Kemajuan-kemajuan yang dicapainya sebagai negara berhaluan Marxis-Leninis yang pertama di dunia telah mendorongnya untuk bertindak sebagai pusat penyebaran paham tersebut. Oleh karenanya Uni Soviet merasa berhak atas kehadiran di semua wilayah di dunia ini, tidak terkecuali di Asia Tenggara. Meskipun pada dasarnya Asia Tenggara bukanlah wilayah yang secara tradisional dikenal oleh Uni Soviet, dalam perkembangan politik dewasa ini posisi Asia Tenggara semakin penting artinya. Bagi Uni Soviet, Asia Tenggara merupakan jembatan yang menghubungkan Asia Selatan dengan Asia Timur di mana Uni Soviet mempunyai banyak kepentingan. Asia Tenggara juga merupakan jalur penghubung bagi armada Angkatan Laut Uni Soviet yang berada di Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia.

Kecenderungan Uni Soviet untuk memperluas lingkaran pengaruhnya semakin terasa dengan meningkatnya persaingan kedua superpower ataupun pertikaianya dengan RRC. Uni Soviet sangat berkepentingan untuk membebaskan wilayah ini dari pengaruh RRC. Seperti Uni Soviet dilingkari oleh kekuatan-kekuatan yang memusuhinya, Uni Soviet juga melihat kemungkinan-kemungkinan di Asia Tenggara untuk mengepung RRC atau sedikitnya menciptakan suatu wilayah yang tidak aman bagi RRC.

Seiring dengan masalah-masalah di atas dan bertolak dari perkiraan akan adanya kekosongan kekuatan berkenaan dengan penarikan pasukan Inggris

dari sebelah timur Terusan Suez dan pasukan Amerika Serikat dari daratan Asia, Brezhnev di muka Konferensi Partai-partai Komunis Sedunia di Moskow tanggal 7 Juni 1969 melansir gagasan Sistem Keamanan Kolektif Asia.

Brezhnev menyarankan agar di kawasan-kawasan di dunia di mana terpusat bahaya perang dunia atau pertikaian bersenjata seperti di Asia dibentuk suatu sistem keamanan bersama sebagai pengganti yang paling baik bagi pengelompokan-pengelompokan militer-politik yang ada.

Sistem Keamanan Kolektif ini diletakkan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bersifat universal: negara-negara yang berbeda sistem sosial dan politiknya dapat berpartisipasi dan bekerja sama;
2. Persamaan dan hormat terhadap status internasional setiap negara, yang berarti tidak boleh ada dominasi terhadap negara-negara lain dan persamaan dengan itu menghormati prinsip-prinsip netralitas dan non-aligned;
3. Keharusan bersama untuk tidak melakukan agresi;
4. Mengutamakan konsultasi politik untuk bersama-sama menjamin integritas dan kedaulatan setiap negara terhadap tindakan militer negara lain;
5. Mendorong perlucutan senjata dan menciptakan wilayah bebas nuklir di kawasan-kawasan tertentu;
6. Mendorong kerja sama ekonomi atas dasar keserasian kepentingan regional dan internasional.

Pengelompokan militer yang ada sekarang ini disebut sebagai "one sided formula military confrontation" dan oleh sebab itu gagasan Brezhnev dimaksudkan sebagai suatu alternatif bagi persaingan blok yang ada pada saat itu. Slogan yang dipakai ialah "Security of all, security for each."

PM Zou En Lai dalam suatu jamuan makan tanggal 13 Juli 1969 mengatakan bahwa gagasan itu merupakan suatu usaha Uni Soviet untuk memaksakan pembentukan suatu aliansi militer anti-RRC.

Duta Besar Uni Soviet untuk Jepang dalam pembicaraannya dengan menteri luar negeri negara itu mengatakan bahwa buat sementara usul itu memang dimaksud untuk membendung RRC, tetapi kalau keadaan telah mengizinkan maka RRC pun akan diajak serta.

Namun karena kemajuan-kemajuan yang dicapai Uni Soviet di dalam bidang teknologi militer, termasuk kemajuan kemampuan angkatan lautnya yang luar biasa pesatnya dalam 25 tahun terakhir ini, membawa kecemasan

bagi lawan-lawannya. Kehadiran Uni Soviet di perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan khususnya di Asia Tenggara telah membawa perkembangan-perkembangan baru. Persaingan antara Uni Soviet dan lawan-lawannya semakin meningkat. Normalisasi hubungan Amerika Serikat-RRC dan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Jepang-RRC merupakan suatu pukulan bagi Uni Soviet. Hal ini disebabkan karena masih adanya persengketaan dengan Jepang mengenai empat pulau di sebelah utara yang diduduki Uni Soviet dan dimuatnya perumusan anti-hegemoni. Perkembangan-perkembangan ini merupakan suatu titik balik bagi kepentingan Uni Soviet. Paling tidak kekhawatiran lama akan kekuatan-kekuatan musuh yang melingkarinya tergugah kembali, sehingga mau tidak mau Uni Soviet harus mengimbanginya.

Dilihat dari konteks itu maka invasi Vietnam ke Kamboja yang mendapat dukungan dari Uni Soviet merupakan "proxy war" Uni Soviet untuk keluar dari lingkaran tersebut. Tekanan-tekanan negara-negara tersebut di atas pada Vietnam semakin memperkuat pengaruh Uni Soviet atas negara itu. Sebagai imbalan bantuan itu Uni Soviet telah mendapatkan fasilitas-fasilitas pangkalan laut di Cam Ranh Bay dan Pangkalan Udara Da Nang dan kini juga di Kom Pong Sam, Kamboja.

Jelas di sini terlihat bahwa kehadiran Uni Soviet di Asia Tenggara lebih banyak ditentukan oleh lawan-lawan politiknya. Dengan masuknya RRC ke dalam lingkup persekutuan dengan Amerika Serikat dan Jepang serta serbuan RRC ke Vietnam hubungan Uni Soviet-Vietnam menjadi semakin substansial. Tetapi tidak dimungkiri bahwa Vietnam mempunyai tujuan-tujuan politiknya sendiri untuk membentuk suatu hubungan khusus di antara ketiga negara Indocina dan punya peran di Asia Tenggara dengan menghancurkan pijakan RRC di Kamboja.

Amerika Serikat

Pengalaman pahit dalam Perang Vietnam menyebabkan Amerika Serikat tidak lagi menghendaki keterlibatan pasukannya di Asia Tenggara. Ini berarti bahwa semua pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan itu termasuk seluruh pasukannya yang ditempatkan di Thailand ditarik dalam tahun 1978.

Akan tetapi ini tidak berlangsung lama. Sebagai akibatnya kemelut Kamboja dan peristiwa-peristiwa lain seperti membanjirnya pengungsi Indocina dan meningkatnya kehadiran Uni Soviet di Vietnam, kawasan Asia Tenggara telah kembali menarik perhatian Amerika Serikat.

Arti strategis kawasan itu dirasakan tambah meningkat dengan semakin besarnya kemampuan militer Uni Soviet di atas, untuk memproyeksikan kekuatannya secara global dan meningkatnya arti lalu-lintas barang dan bahan, khususnya bahan energi bagi kehidupan banyak negara.

Perairan-perairan di kawasan yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu oleh Amerika Serikat juga dirasakan tambah penting karena meningkatnya operasi yang harus dilakukan oleh Armada VII Amerika Serikat yang berpusat di Pilipina. Tampaknya titik berat peranan Amerika Serikat di Asia Tenggara akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di lautan, selain peningkatan ekonomi dan sosial negara-negara non-komunis Asia Tenggara. Untuk itu Amerika Serikat telah menempatkan peluru-peluru kendali Cruise Missile, meningkatkan kekuatan armada Pasifiknya dengan kapal-kapal penjelajah baru, kapal-kapal perusak kelas Spruance, frigat-frigat peluru kendali kelas Perry dan kapal-kapal selam nuklir penverang kelas Los Angeles. Amerika Serikat juga telah meningkatkan kemampuan angkatan udaranya dalam rangka penerapan Doktrin Swing, yaitu pemindahan kekuatan laut dari satu daerah ke daerah lainnya dengan cepat bilamana perlu.

Arti pangkalan-pangkalan udara Clark dan Laut Subic di Pilipina dirasakan meningkat, terutama sekali karena fasilitas-fasilitasnya dan letak/lokasinya di pertengahan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini telah membuat Amerika Serikat bersikap luwes terhadap tuntutan-tuntutan Pilipina. Berdasarkan perjanjian Amerika Serikat-Pilipina, Amerika Serikat akan tetap menggunakan kedua pangkalan tersebut. Sebagai imbalan, penggunaannya adalah dalam batas-batas kedaulatan Pilipina dan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi.

Sikap kebijaksanaan pertahanan Amerika Serikat ini telah membatalkan rencana pengurangan pasukan-pasukan darat Amerika Serikat di Korea Selatan. Malah sebaliknya Pemerintah Reagan membantu pertahanan Korea Selatan dengan memberikan pesawat-pesawat tempur jenis mutakhir F-16 sebanyak 36 buah.

Selain itu usaha Amerika Serikat untuk menghadapi Uni Soviet tersebut ditopang oleh persekutuan militer Amerika Serikat-Australia-Selandia Baru (ANZUS), keanggotaan kedua negara yang terakhir itu dalam Five Powers Defence Arrangement, dan peningkatan hubungan baik dengan Jepang dan RRC. Hubungan baik Amerika Serikat dengan Jepang dipandang sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Pasifik. Jepang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan ini. Dengan kemampuan ekonomi dan teknologinya yang tinggi, Jepang oleh Amerika Serikat diharapkan ambil bagian yang lebih besar dalam membantu pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan itu.

Jepang sebagai negara besar mempunyai potensi untuk mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Sebaliknya bagi Jepang Amerika Serikat merupakan perisai nuklir untuk menangkal bahaya dari luar.

Dengan RRC, hubungan Amerika Serikat mempunyai arti strategis. Seditik banyak faktor RRC ini dipergunakan sebagai semacam kartu dalam menghadapi usaha-usaha perluasan pengaruh Uni Soviet. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan dukungannya terhadap Vietnam dalam masalah Kamboja lebih mendekatkan kedua negara. Dalil mengenai pertentangan antara sosialisme dan kapitalisme ternyata tidak menghalangi maksud Amerika Serikat dan RRC untuk menjalin hubungan baik. Hal ini dapat terjadi karena persamaan kepentingan dan mereka saling membutuhkan dalam menghadapi lawan yang sama.

Meskipun terdapat banyak ganjelan dalam hubungan mereka seperti masalah Taiwan dan kasus Hu Na yang meminta suaka kepada Amerika Serikat diperkirakan bahwa hubungan kedua negara itu tidak akan mengalami penurunan. RRC kiranya akan tetap memerlukan investasi modal, teknologi dan ketrampilan dari Barat khususnya Amerika Serikat dalam rangka pelaksanaan modernisasinya. Pendekatan Uni Soviet-RRC agaknya hanya merupakan suatu move RRC saja karena sengketa kedua negara itu pada dasarnya sangat mendasar dan kompleks.

Jepang

Kehadiran Jepang di Asia Tenggara didorong oleh kepentingan ekonominya. Asia Tenggara mempunyai arti strategis dan vital bagi Jepang, baik sebagai sumber bahan baku maupun sebagai wilayah pemasaran hasil industri-nya. Kawasan Asia Tenggara juga penting bagi keamanan alur-alur laut bagi pengangkutan energinya dari Teluk Persia. Oleh karena itu Jepang sangat berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan itu.

Kemelut Indocina menurut Jepang dapat membawa akibat-akibat di bidang keamanan bagi kawasan Asia Tenggara. Karena itu Jepang akan selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan diplomasinya dalam usaha membantu mengusahakan perdamaian demi kepentingan nasionalnya. Sejak berakhirnya Perang Vietnam 1975 Jepang menyatakan akan melakukan politik yang seimbang antara negara-negara Indocina dan ASEAN. Memang pada waktu itu diperkirakan Vietnam akan menjalin hubungan berdampingan secara damai dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangganya. Namun ka-

rena keadaan ternyata berkembang ke arah lain, Jepang kemudian menentukan pendiriannya sejajar dengan pendirian ASEAN. Hanya perlu disadari bahwa pendirian ini diambil bukan untuk kepentingan Asia Tenggara melainkan semata-mata untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Secara politis Jepang dengan gigih menyokong pendirian ASEAN, akan tetapi sesungguhnya tidak terlalu menghiraukan perkembangan politik negara-negara Indocina.

Jepang membekukan bantuan yang telah dijanjikannya kepada Vietnam sebesar US\$ 58,5 juta untuk tahun anggaran 1979 guna menunjang pendiriannya itu. Tetapi kemudian itu dicairkannya kembali dan bahkan ia melangkah lebih jauh lagi dengan mengirimkan misi-misi dagang swastanya ke Vietnam dan Kamboja untuk merintis hubungan perdagangan dengan negara-negara dimaksud. Karena itu kepentingan Jepang pada dasarnya terletak semata-mata pada kepentingan ekonominya khususnya demi kelangsungan hidup industrinya.

ASEAN

Dalam pertemuan tahunan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur 1971, disadari bahwa pergolakan di Indocina akan semakin membuka peluang bagi masuknya pengaruh dan campur tangan negara-negara besar di Asia Tenggara. Perkembangan ini telah mendorong tumbuhnya kemauan politik di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memantapkan usaha kerja sama demi tercapainya ketahanan sekawasan, meskipun pada dasarnya titik berat kerja sama ASEAN adalah di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Karenanya di dalam pertemuan itu dikeluarkan "Deklarasi Kuala Lumpur" 27 Nopember 1971, suatu deklarasi mengenai "Zone of peace, freedom and neutrality, free from any form or manner of interference by outside power."

Political will ini bertambah penting artinya sejak berakhirnya Perang Vietnam di awal tahun 1975, di mana golongan komunis berhasil menumbangkan lawan-lawannya di Vietnam Selatan, Laos dan Kamboja. Kemenangan komunis ini telah membawa konsekuensi berubahnya peta politik di Asia Tenggara. Kini terlihat adanya suatu kenyataan polarisasi kelompok kekuatan yang berbeda sistem sosial dan politiknya antara negara-negara ASEAN yang non-komunis dan negara-negara Indocina yang komunis.

Hal tersebut semakin terasa lagi karena Amerika Serikat telah kehilangan pengaruhnya di jazirah Indocina dan tidak dapat mempertahankan kehadiran militernya di daratan Asia Tenggara. Keadaan ini telah memberi peluang kepada Uni Soviet yang dalam pertikaianya dengan RRC telah mengusulkan

pembentukan Asia Collective Security System seperti diuraikan di atas. Di samping itu Uni Soviet juga berusaha menjalin hubungan baik dengan India, Bangladesh, Vietnam dan Laos, serta berusaha memperbaiki hubungannya dengan Jepang. Tersirat di dalam langkah Uni Soviet ini usaha-usaha untuk melingkari dan mengucilkan RRC.

Sebaliknya di dalam persaingan itu RRC berusaha menerobos pengepungan itu dengan menjalin hubungan baik dengan Pakistan, Kamboja dan pengakuannya terhadap ASEAN. Sejalan dengan itu RRC berusaha pula untuk memperbaiki hubungannya dengan India, Bangladesh dan Jepang. RRC tidak menghendaki semakin bertambahnya pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Indocina adalah lebih baik dibandingkan hubungan RRC dengan negara-negara tersebut.

Dalam menghadapi perkembangan-perkembangan di atas, ASEAN menyadari perlunya usaha-usaha bagi pengakuan oleh semua pihak terhadap konsep ZOPFAN dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ASEAN dalam usaha menjalin hubungan baik dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara Indocina khususnya Vietnam. Pilihan ini kiranya adalah yang terbaik bagi ASEAN sebagai usaha untuk menciptakan suatu kawasan yang stabil, aman, damai dan bebas dari pengaruh negara-negara besar.

Vietnam adalah negara tetangga dekat yang akan tumbuh menjadi suatu kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan sikap bersahabat dengan Vietnam dan negara-negara Indocina lainnya diharapkan negara-negara ini dapat tumbuh menjadi negara yang bebas dari pengaruh mana pun, yang berarti pula akan memperkecil ruang gerak persaingan negara-negara besar di Asia Tenggara.

Sifat akomodatif ASEAN ini pada mulanya telah membawa harapan-harapan yang menggembirakan. Telah terjadi pendekatan ASEAN dengan negara-negara Indocina khususnya Vietnam. Meskipun ini mungkin didorong oleh kepentingan Vietnam dalam menghadapi RRC yang berusaha memperkukuh pijakannya di Kamboja. Wakil Menlu Vietnam Phan Hien menyatakan keyakinannya di Kuala Lumpur pada 24 Juli 1978 bahwa Vietnam dan ASEAN akan memasuki era kerja sama erat dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Pernyataan Phan Hien ini lebih dipertegas lagi dalam pertemuan para duta besar ASEAN di New York dengan Wakil Menlu Vietnam Vo Dong Giang dan dalam kunjungan PM Pham Van Dong ke negara-negara ASEAN bulan September dan Oktober 1978.

Namun citra politik yang mulai membaik ini tiba-tiba memburuk akibat invasi Vietnam ke Kamboja dan membanjirnya pengungsi-pengungsi Indocina

ke negara-negara ASEAN. Dalam pandangan ASEAN, Vietnam telah melanggar janji-janji yang pernah diberikannya untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara di Asia Tenggara. Invasi Vietnam ini telah membawa kemunduran di dalam hubungan kedua belah pihak.

DAMPAK PERKEMBANGAN DI INDOCINA TERHADAP ASEAN

Masalah Kamboja telah membawa ketidakstabilan kawasan. Keinginan Vietnam untuk tetap mempertahankan kedudukannya dengan pembentukan "solidaritas militan" di antara ketiga negara Indocina banyak membawa ketegangan dengan negara-negara tetangganya. RRC yang merasa wilayah pijakannya di Kamboja dihancurkan oleh Vietnam dengan dukungan Uni Soviet kiranya akan terus memberi bantuan kepada rezim Pol Pot/Khmer Merah baik secara langsung maupun melalui wilayah Thailand.

Thailand tampaknya merasa dirinya yang paling terancam oleh perubahan peta politik yang terjadi dengan munculnya tiga negara Indocina komunis tersebut. Thailand agaknya khawatir bahwa akibat kemenangan komunis di ketiga negara Indocina itu serta kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja akan terjadi infiltrasi dan subversi. Desakan pasukan Vietnam terhadap gerilyawan Khmer Merah telah menyebabkan wilayah Thailand menjadi tempat pelarian mereka. Vietnam menuduh Thailand melindungi pasukan Khmer Merah dan juga memberi latihan militer kepada mereka untuk melawan pasukan Pemerintah Heng Samrin dan Vietnam. Vietnam juga menuduh Thailand telah menyediakan wilayahnya sebagai jalur bantuan RRC kepada rezim Khmer Merah. Hal itu semakin memperuncing hubungan Thailand dengan negara-negara tetangganya itu. Posisi Thailand ini telah membawa pengaruh pada suara, sikap dan langkah ASEAN, sehingga mempersulit usaha-usaha ASEAN dalam mencari penyelesaian politik masalah Kamboja. Hal itu lebih dipersulit lagi dengan dukungan ASEAN terhadap pembentukan Pemerintahan Koalisi yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk.

Langkah-langkah ASEAN yang agaknya didasarkan pada perhitungan bahwa pembentukan Pemerintah Koalisi itu pada suatu saat nanti dapat menggantikan posisi Khmer Merah yang mempunyai reputasi buruk tampaknya kurang mencapai sasaran. Khmer Merah yang mendapat dukungan RRC itu justru lebih berhasil memanfaatkan dukungan ASEAN untuk memperkuat kedudukannya. Dalam kenyataan Khmer Merah mempunyai pasukan yang kuat dan paling banyak anggotanya sehingga lebih mampu menahan serangan-serangan pasukan Pemerintah Heng Samrin dan Vietnam dibandingkan dengan pasukan-pasukan Son Sann dan Sihanouk.

Perhitungan ASEAN yang lain, bahwa pembentukan koalisi itu akan dapat menambah tekanan dunia internasional pada Vietnam tampaknya juga masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Vietnam justru mengatakan bahwa situasi di Kamboja dan Indocina adalah irreversible. Andaikata sikap Vietnam ini bisa diartikan bahwa situasi di Kamboja tidak bisa lagi diubah, maka penyelesaian masalah itu akan semakin sulit untuk dicapai karena Vietnam tentunya tidak akan bersedia untuk mengubah situasi yang dapat merugikan.

MASA DEPAN ASIA TENGGARA

Perbedaan ASEAN dengan negara-negara Indocina yang berkepanjangan dalam masalah Kamboja akan semakin memperbesar ruang gerak negara-negara besar untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Oleh sebab itu kiranya jalan yang terbaik adalah menjembatani perbedaan tersebut. Dalam rangka itu negara-negara ASEAN terlebih dahulu harus berani merenungkan dan mengoreksi kebijaksanaan serta langkah-langkah yang mereka tempuh selama ini.

Perbedaan penekanan dalam melihat permasalahan Kamboja sebagai akibat posisi yang berbeda telah menyebabkan langkah-langkah negara ASEAN kelihatannya kurang terkoordinasi. Thailand sebagai negara garis depan yang berbatasan dengan Kamboja dan Laos merasa keamanannya paling terancam dengan gerakan pasukan Vietnam di perbatasan yang kadang-kadang masuk ke dalam wilayahnya. Tetapi beberapa negara ASEAN lainnya berpendapat bahwa masalah Kamboja pada dasarnya bersumber pada pertikaian Vietnam-RRC yang sama-sama mencari pengaruh di Kamboja dan sengketa Uni Soviet-RRC, bukan pada pertentangan Vietnam-ASEAN. Perbedaan pandangan ini tampaknya telah menghambat usaha-usaha ASEAN untuk mencari kebersamaan dengan Vietnam dalam menyelesaikan masalah Kamboja tersebut.

Hubungan bertetangga baik yang saling menguntungkan akan lebih bermanfaat bagi masing-masing negara. Perbedaan yang berkepanjangan akan terus mengobarkan peperangan yang hanya membawa kesengsaraan tidak saja bagi rakyat Kamboja, tetapi juga bagi rakyat Thailand, Laos dan Vietnam, bahkan tidak mustahil untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Karenanya perlu dikaji pernyataan Deputy Menteri Luar Negeri Uni Soviet Mikhail Kapitsa dalam kunjungannya di Singapura 7 April 1983 yang lalu. Kapitsa mengatakan bahwa seluruh prasarana di Asia Tenggara akan mengalami erosi kalau ASEAN tidak mengakhiri konfrontasinya dengan negara-negara Indocina. Kapitsa tampaknya berpendapat bahwa antara ASEAN dan Indocina telah

terjadi perang tanpa diumumkan. Untuk itu agaknya Kapitsa menganjurkan kepada Vietnam untuk melakukan pembalasan dengan cara yang sama dan memberikan bantuan persenjataan kepada gerakan-gerakan pemberontakan di negara-negara ASEAN kalau mereka tetap mendukung Khmer Merah.

Pernyataan Kapitsa ini tampaknya memang sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan Vietnam sekarang ini. Dengan alasan melumpuhkan perlawanan Khmer Merah atau Pasukan Pemerintah Koalisi, Vietnam melakukan gempuran-gempuran di perbatasan Kamboja-Thailand dan tidak jarang pasukannya sengaja masuk ke dalam wilayah Thailand. Taktik Vietnam ini dinilai para pengamat sebagai usaha Vietnam memaksa Thailand menerima tawaran Vietnam/Kamboja untuk mengadakan perundingan. Dan kiranya jalan perundingan merupakan alternatif yang paling baik untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul.

PERANAN INDONESIA

Cara kekerasan militer yang diterapkan untuk memaksakan kehendak suatu negara terhadap negara lain yang diakui dunia internasional merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hubungan internasional yang berlaku. Usaha-usaha demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat menghilangkan jaminan untuk negara-negara kecil bagi kelangsungan hidup mereka. Tindakan Vietnam terhadap Kamboja merupakan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Keinginan Vietnam untuk membentuk suatu ikatan khusus dengan Kamboja dengan pertimbangan keamanan kiranya dapat dimengerti, tetapi cara yang ditempuh tidak dapat dibenarkan. Selain bertentangan dengan hukum, hal itu juga akan semakin menjauhkan kawasan dari rasa kedamaian karena justru membawa ketegangan-ketegangan dan campur tangan negara besar yang punya kepentingan-kepentingan tertentu.

Gerakan-gerakan anti-Vietnam masih tetap bertahan dan semakin mendapat perhatian dunia internasional. Di samping itu pertempuran-pertempuran masih sering terjadi, terutama di perbatasan Kamboja-Thailand, yang mengancam keamanan negara ini dan dapat memperluas konflik. Sementara itu posisi Vietnam secara politis semakin terjepit oleh tekanan dunia internasional, dan secara fisik oleh tekanan RRC di perbatasan serta bantuan yang terus mengalir bagi gerakan-gerakan Khmer Merah. Masalah-masalah ekonomi dalam negeri yang semakin gawat dan bantuan-bantuan Uni Soviet semakin menjerumuskan Vietnam ke dalam orbit pengaruh negara besar ini.

Masalah Kamboja bagi Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari konteks persepsi hakikat ancaman yang dihadapi. Golongan-golongan ekstrem baik kiri maupun kanan tetap akan merupakan ancaman yang harus dihadapi

dan ditanggulangi. Dalam hubungan ini komunisme sebagai ideologi mondial yang sifatnya ekspansif, baik yang datang dari RRC maupun Uni Soviet, merupakan salah satu ancaman tersebut di atas. Ditinjau dari besarnya ancaman, maka diperkirakan ancaman komunisme RRC akan lebih menonjol. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur-unsur komunis Mao di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara di samping kehadiran orang-orang keturunan Cina di kawasan ini yang jumlahnya tidak kurang dari 15 juta, dengan posisi yang umumnya dominan di bidang perekonomian.

Di dalam menilai kemelut Kamboja, tampaknya Indonesia berpendapat bahwa pada hakikatnya hal tersebut merupakan persengketaan Vietnam-RRC yang pada gilirannya mengundang campur tangan Uni Soviet. Pertikaian Vietnam-RRC dan Uni Soviet-RRC telah membawa ketegangan yang semakin meluas di Asia Tenggara. Untuk mengurangi ancaman tersebut diharapkan agar negara-negara Indocina masing-masing berdaulat dan mengatur hubungan mereka sendiri bebas dari campur tangan atau pengaruh Uni Soviet dan RRC.

Namun karena adanya persengketaan di atas, harapan ini tampaknya merupakan sesuatu yang sulit. Tekanan RRC yang berlebihan, pengucilan Vietnam oleh negara-negara non-komunis ASEAN, Blok Barat dan Jepang terutama dalam bantuan ekonomi serta bantuan material RRC bagi rezim Khmer Merah via Thailand telah memperkecil harapan akan tercapainya suatu perdamaian di kawasan ini. Kemandirian Vietnam dikelilingi oleh negara-negara merdeka lainnya yang tidak memusuhinya kiranya merupakan jalan ke luar dari kemelut Indocina saat ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ASEAN adalah untuk mencari jalan pemecahan masalah Kamboja secara menyeluruh dan tidak berarti melibatkan ASEAN ke dalam konflik tersebut.

Konperensi Internasional tentang Masalah Kamboja yang diprakarasi ASEAN pada bulan Juli 1981 di New York baru merupakan awal dari usaha untuk menarik semua pihak ke meja perundingan. Karena tanpa ikut sertanya Vietnam cs., usaha-usaha itu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karenanya perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk membina saling pengertian antara Vietnam cs. dan ASEAN termasuk hubungan-hubungan bilateral. Cara ini mungkin lebih efektif untuk mencapai hasil yang dicita-citakan, yaitu suatu kawasan yang damai, bebas dan aman di Asia Tenggara.

Peranan Indonesia dalam kemelut Kamboja merupakan batu uji pelaksanaan politik bebas aktif demi perdamaian yang didasarkan atas kemerdekaan dan keadilan sosial. Jalan masih jauh dan penuh liku, namun dengan berpegang pada amanat Pembukaan UUD 1945, kiranya Indonesia akan tetap menyumbangkan darma baktinya membantu mengusahakan perdamaian dan ketertiban dunia.

DAFTAR BACAAN

1. Direktorat Research Departemen Luar Negeri, *Laporan Research tentang Masalah Indocina*, 1972.
2. Direktorat Research Departemen Luar Negeri, *Background Information tentang Kamboja dalam Rangka Persoalan Indocina, Keadaan Sampai Mei 1970*, 1972.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Hubungan AS-US*, 1976.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Masalah Laos*, 1976.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Masalah Vietnam, dari Penjajahan, dan Perpecahan ke Kemerdekaan dan Persatuan*, 1976.
6. Sudibjo (Editor), *Indonesia dan Dunia Internasional*, Jakarta: CSIS, 1977.
7. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Lembaga Studi Strategis, *Tekanan Pengaruh Dinamika Ekstern terhadap Indonesia*, Jakarta 1978.
8. Kementerian Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam, *Hubungan Vietnam-Cina*, Jakarta, Oktober 1979.
9. Kedutaan Besar Jepang, *Hubungan Indonesia-Jepang*, Jakarta, 1981.
10. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, *Kerjasama Regional ASEAN*, Bandung, 1977.
11. Lie Tek Tjeng, "Pengaruh Negara-negara Besar dalam Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara," Seminar Perkembangan di Indocina dan Implikasinya bagi Asia Tenggara, Pebruari, 1979.
12. *History of the August Revolution*, Foreign Languages Publishing House, Hanoi, 1972.
13. Buttinger, Joseph, *Vietnam: A Political History*, Frederick A Praeger, New York, 1968.
14. *Strategic Survey 1979*, The International Institute for Strategic Studies, London.
15. *The Military Balance 1980-1981*, The International Institute for Strategic Studies 1980, London.
16. Sudershan Chawla, Melvin Gurtov and Alain Gerald Marshod, *Southeast Asia Under the New Balance of Power*, Praeger Publishers Inc., USA, 1974.
17. Sheper and Campbell, *US Defence Expenditures*, 1969.
18. Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *Sewindu ASEAN 1967-1975*, Jakarta, 1975.
19. Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *Dasawarsa ASEAN 1967-1977*, 1977.
20. Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Non-Governmental/Private Organizations*, Jakarta, 1977.
21. Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Document*, Jakarta, 1979.
22. *Empat Negara Besar dan Asia Tenggara*, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 1980.
23. Far Eastern Economic Review, *Asia Year Book*, Hongkong 1979.
24. *Asian Survey*, Vol. XX, No. 1, Januari 1980.
25. Asia Tenggara Bergolak, *Analisa*, CSIS, No. 8, 1979.
26. *Asia Week*, 19 Mei 1980.
27. *Indonesian Observer*, 10 Pebruari 1981.
28. Jusuf Wanandi, "Arah Kebijakan Amerika Serikat di Masa Mendatang," *Analisa*, CSIS, No. 12, 1979.
29. Jusuf Wanandi, "Segi-segi Politik Keamanan Asia Tenggara," *Analisa*, CSIS, No. 6, 1978.
30. *Kompas*, 15 Januari 1981.
31. Porter Gareth, "Vietnam's Soviet Alliance: A Challenge to U.S. Policy," *Indocina's Issues*, 6 Mei 1980.